

## Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Sumatera Utara (Tahun 2001-2021)

Devi Margaretha Sitanggang<sup>1</sup> Eka Saripa Siburian<sup>2</sup> Mei Sarah Tobing<sup>3</sup> Eko Wahyu Nugrahadi<sup>4</sup> Muammar Rinaldi<sup>5</sup>

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [devisitanggang23@gmail.com](mailto:devisitanggang23@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Masalah Pengangguran dan Kemiskinan sudah tidak asing lagi, setiap tahunnya masalah ini terus terjadi. Pemerintah selalu mencari solusi untuk ini demi kemajuan pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia. Tujuan dalam penelitian ini melihat seberapa besar pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, dan bagaimana pengaruhnya terhadap Belanja/pengeluaran pemerintah. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara pada tahun 2001-2021, dimana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah mampu mengurangi Pengangguran dan Kemiskinan di Sumatera Utara dilihat dari variabel Pengangguran dan kemiskinan memberikan kontribusi terhadap Persentase Belanja Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara sebesar 77.5 persen, sedangkan sisanya 22.5 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Maka diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan dilihat dari hasil penelitian ini.

**Kata Kunci:** Pengangguran, Kemiskinan, Belanja Pemerintah



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal adalah aturan atau strategi yang dilakukan pemerintah untuk menjaga pemasukan dan pengeluaran negara agar tetap stabil sehingga negara bisa terus bertumbuh, dapat juga dikatakan kebijakan fiskal adalah kebijakan dari pemerintah yang mempengaruhi perekonomian negara lewat perubahan penerimaan dan pengeluaran pemerintah sesuai yang telah ditetapkan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Banyak manusia yang menginginkan untuk hidup berkecukupan dan sejahtera, bahkan Indonesia juga pada dasarnya berprinsip begitu juga, negara Indonesia juga menginginkan agar rakyat Indonesia sejahtera dan berkecukupan, kesejahteraan yang dimaksud yaitu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Definisi kemiskinan menurut banyak orang itu berbeda-beda, bahkan menurut para ahli juga demikian, Menurut BPS 2016 kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dengan pengeluaran, Menurut BPS Dan Depapertemen social 2002 Kemiskinan Secara Etimologis adalah tidak berharta benda dan serba kekurangan atau dapat juga dikatakan bahwa seseorang yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak.

Menurut Pandangan Penulis bahwa kemiskinan adalah kondisi dimana setiap individu atau kelompok yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap Sumber Daya Ekonomi, Sosial, dan Politik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. Sama hal dengan Pengangguran, pemikiran seseorang dalam mendefinisikan pengangguran juga berbeda, jika ditanyai kepada setiap individu bahwa mereka juga tidak ingin jika tidak mempunyai pekerjaan, pengangguran adalah kondisi dimana seseorang yang ingin bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan keinginannya. Oleh sebab itu

upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberantas atau memusnahkan kemiskinan dan pengangguran yaitu membutuhkan dukungan anggaran dalam APBN atau sering disebut dengan belanja pemerintah, belanja pemerintah merupakan roda pelaju untuk perekonomian baik nasional maupun regional upaya mensejahterakan rakyat miskin atau angka kemiskinan dan pengangguran.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Belanja Negara**

Belanja negara adalah Jumlah total belanja pemerintah dapat dipecah menjadi tiga kategori berbeda: dana yang dialokasikan oleh anggaran pusat, uang yang ditransfer ke daerah, dan sumber daya keuangan yang disisihkan untuk dana desa. Ada beberapa belanja pemerintah sebagai berikut:

1. Belanja pegawai adalah penghidupan pada bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, serta pensiunan serta pegawai honorer yg akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik menjadi ketidakseimbangan atas pekerjaan yg telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas serta fungsi unit organisasi pemerintah.
2. Belanja barang dagangan adalah pengeluaran untuk barang dan/atau jasa yang stoknya habis Untuk produksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan atau tidak dipasarkan Pemasaran dan pengadaan barang untuk dikirim atau dijual Standar belanja sumbangan dan belanja perjalanan kepada masyarakat luar.
3. Belanja modal yaitu di keluarkan untuk pembelian aset dan/atau meningkatkan nilai aset tetap/aset lain yang memberikan manfaat lebih dari satu periode Akuntansi dan melampaui minimum kapitalisasi aset tetap /aset lainnya hal ini diputuskan oleh pemerintah
4. Belanja pemerintah pusat dialokasikan untuk pembayaran bunga utang. Pembayaran hutang bergantung pada penggunaan jumlah pokok, berapapun sisa saldonya. "Utang dapat bersumber dari dalam negeri atau luar negeri, dan dapat dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Perhitungannya ditentukan melalui penilaian terhadap posisi pinjaman.
5. Subsidi mengacu pada penjatahan dana dari anggaran kepada lembaga atau perusahaan. Individu dan bisnis terlibat dalam produksi, penjualan, ekspor, atau impor barang dan jasa yang memenuhi persyaratan yang diperlukan. Bagi banyak orang, penghidupan mereka bergantung pada keterjangkauan harga jual. Undang-Undang APBN yang ditetapkan oleh masyarakat merupakan kerangka peraturan penting yang memberikan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan anggaran negara.
6. Belanja hibah adalah pengeluaran pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang atau jasa pemerintah kepada badan usaha milik negara, pemerintah lain, organisasi/lembaga internasional, pemerintah daerah, khususnya pinjaman luar negeri dan/atau hibah yang diberikan kepada daerah tanpa pengembalian, tanpa kewajiban atau kewajiban, sewaktu-waktu, sukarela dengan peralihan hak dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi dan penerima manfaat.
7. Bantuan sosial merujuk kepada bantuan tidak lestari dan terpilih dalam bentuk wang/barangan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8. Belanja lainnya adalah seluruh belanja atau belanja pemerintah pusat Ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan instansi yang belum memiliki kode departemen Anggaran, kebutuhan sementara (tidak berkelanjutan), kewajiban pemerintah Berupa sumbangan atau iuran keanggotaan kepada organisasi/lembaga keuangan internasional Tidak masuk dalam anggaran dan dana kementerian/lembaga nasional Cadangan risiko fiskal dan perkiraan kebutuhan darurat

### **Belanja Pemerintah**

Belanja pemerintah/Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesebroto, 2002). Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional yaitu  $Y = C + I + G + (X-M)$  yang merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari persamaan diatas dapat ditelaah bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya (Dumairy, 2006). Terkait dengan perkembangan pengeluaran pemerintah, hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu (Mangkoesebroto, 2002): Perubahan permintaan akan barang publik; Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi; Perubahan kualitas barang publik; Perubahan harga faktor produksi;

### **Kemiskinan**

Menurut Maipita (2014), kemiskinan adalah suatu kondisi tidak tercapainya tujuan. Kebutuhan dasar atau kebutuhan dasar yang membuat tidak mungkin adanya taraf hidup yang layak. Kebutuhan dasar yang tercakup meliputi pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain Ada pendapat antara lain bahwa kemiskinan disebabkan oleh perbedaan kepemilikan factor Produksi, kegagalan kepemilikan, bias kebijakan, perbedaan kualitas sumber daya Jumlah penduduk dan tingkat pembentukan modal masyarakat rendah. Pendekatan antropologi sosial, sebaliknya, menekankan adanya pengaruh budaya yang cenderung bertahan secara permanen(Maipita, 2014).

### **Pengangguran**

Menurut Sadono Sukirno (1994), pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang dalam angkatan kerja ingin mencari pekerjaan tetapi gagal mendapatkannya. Pengangguran adalah keadaan dimana orang ingin bekerja tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan. Orang-orang yang termasuk dalam kategori pengangguran meliputi: (1) Mereka yang tinggal di wilayah tertentu dan sedang melakukan upaya aktif untuk mendapatkan pekerjaan, (2) Mereka yang sedang mempersiapkan pekerjaan atau usaha baru, (3) Mereka yang mereka yang tidak mencari pekerjaan karena keyakinan bahwa hal tersebut tidak mungkin dicapai, dan (4) Kelompok demografis tertentu yang saat ini tidak mencari pekerjaan karena mereka sudah mendapatkan pekerjaan, namun belum mulai bekerja.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Model persamaan yang digunakan dalam menganalisis Pengaruh belanja pemerintah terhadap pengangguran dan kemiskinan sebagai berikut:

$$Y = a - \beta_1 X_1 - \beta_2 X_2 + e$$

Dimana :

Y = Belanja pemerintah

a = konstanta

X1 = pengangguran

X2 = kemiskinan

e = error term

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara berupa angka pengangguran dan kemiskinan pada tahun 2001 hingga 2021. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Asmsi Klasik dll.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Asumsi Klasik

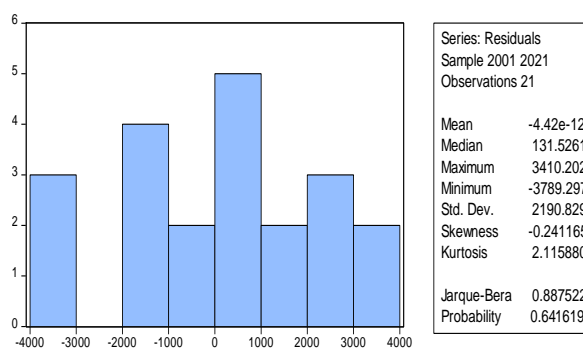
Dilihat dari data yang dipeoleh belanja pemerintah (pengeluaran) selalu adanya kenaikan setiap tahunnya. Pada pengangguran di provinsi sumatera utara dari tahun 2001 mencapai 229.212, lalu pada tahun berikutnya selalu terjadi kenaikan dan juga mengalami penurunan namun hanya sedikit saja. Untuk lebih jelaskan dapat kita lihat pada tabel.1 berikut ini:

**Tabel.1**

Tahun	Pengeluaran	Pengangguran	Miskin
2001	916.20	229,212	1,913,040
2002	1,021.30	355,504	1,883,890
2003	1,352.00	404,117	1,889,400
2004	1,501.50	758,092	1,800,100
2005	1,830.60	636,980	1,760,228
2005	2,184.70	632,049	1,979,702
2006	2,560.70	571,334	1,770,000
2007	2,967.30	554,539	1,630,000
2008	3,444.56	532,427	1,500,000
2009	3,666.70	491,806	1,490,000
2010	4,611.47	402,120	1,436,400
2011	7,633.63	379,980	1,400,400
2012	7,260.47	412,200	1,416,400
2013	7,808.56	390,710	1,360,600
2014	7,959.17	428,794	1,508,140
2016	9,476.42	371,680	1,452,600
2017	12,518.86	377,288	1,326,600
2018	12,563.39	396,027	1,291,900
2019	13,440.32	382,438	1,260,500
2020	12,653.60	507,805	1,356,700
2021	13,749.50	475,156	1,273,070

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

### Uji Normalitas



**Gambar 1.**

Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa prob. 0,6416 > 0,05, maka Ho di terima. Artinya tidak ada pelanggaran normalitas data pada model penelitian tersebut atau residual regresi berdistribusi normal.

**Tabel 2. Uji Autokorelasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	1.977861	Prob. F(2,16)	0.1708
Obs*R-squared	4.162724	Prob. Chi-Square(2)	0.1248

Diketahui prob.  $0,1248 < 0,05$  maka  $H_0$  diterima. Artinya tidak ada pelanggaran autokorelasi data pada model penelitian tersebut.

**Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
F-statistic	1.511429	Prob. F(2,18)	0.2473
Obs*R-squared	3.019571	Prob. Chi-Square(2)	0.2210
Scaled explained SS	1.237768	Prob. Chi-Square(2)	0.5385

Diketahui prob.  $0.2210 > 0.05$ , maka  $H_0$  diterima. Artinya tidak ada pelanggaran heteroskedastisitas pada model penelitian tersebut

**Tabel 4. Uji Multikolinearity**

Variance Inflation Factors			
Date: 11/01/23 Time: 05:15			
Sample: 2001 2021			
Included observations: 21			
	Coefficient	Uncentered	Centered
Variable	Variance	VIF	VIF
C	12829021	50.51712	NA
Miskin	5.18E-06	50.58313	1.092815
Pengangguran	2.01E-05	17.95958	1.092815

Diketahui  $VIF < 10$  (  $M = 1.092$ ;  $P = 1.092$ ) artinya tidak ada pelanggaran multikolinearity data pada model penelitian tersebut.

### Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh variable pengangguran( $X_1$ ), kemiskinan ( $X_2$ ), terhadap variable Belanja pemerintah ( $Y$ ) pada provinsi Sumatera Utara. Berikut tabel untuk Analisis Regresi Berganda:

**Tabel 5.**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	33404.41	3581.762	9.326249	0.0000
Pengangguran	-0.002170	0.004485	-0.483907	0.6343
Miskin	-0.016800	0.002277	-7.378775	0.0000
R-squared	0.775084	Mean dependent var		6243.855
Adjusted R-squared	0.750094	S.D. dependent var		4619.538
S.E. of regression	2309.336	Akaike info criterion		18.45887
Sum squared resid	95994592	Schwarz criterion		18.60809
Log likelihood	-190.8181	Hannan-Quinn criter.		18.49126
F-statistic	31.01499	Durbin-Watson stat		0.531053
Prob(F-statistic)	0.000001			

Dari tabel tersebut didapatkan persamaan regresi yaitu:

$$BP = c + B_1 \text{ Pengangguran} + B_2 \text{ Miskin} + e$$

$$Y = 33404.41 + 0.002170 \text{ pengangguran} + 0.016800 \text{ Miskin} + e$$

Keterangan:

- Konstanta sebesar 33404.41. Artinya jika pengangguran dan Miskin adalah nol maka BP di provinsi Sumatera Utara Sebesar 33.4041 persen.
- Koefisien regresi pengangguran sebesar 0.002170 . artinya jika pengangguran meningkat sebesar 1 persen, maka BP meningkat 0.2170 persen.

- Koefisien regresi berganda kemiskinan sebesar 0.016800. artinya jika kemiskinan meningkat sebesar 1 persen maka BP meningkat sebesar 0.168 persen.

## Uji Hipotesis

### Hipotesis Parsial

Diduga pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase belanja pemerintah di provinsi Sumatera Utara dan Diduga kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persentase belanja pemerintah di provinsi Sumatera Utara

### Hipotesis Simultan

Diduga Pengangguran dan Kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pemerintah di provinsi Sumatera Utara.

## Pembuktian Hipotesis

Pembuktian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t dan uji F:

### 1. Uji t

- a. Hasil pengujian untuk variable X1 dimana  $t_{hitung} = -0.483907 < t_{tabel} = 173406$  dan nilai prob. 0.6343 untuk 2 arah, maka untuk nilai prob 1 arah sebesar 0.05 maka  $H_0$  diterima . Artinya terdapat pengaruh negatif dan signifikan pengangguran terhadap Belanja pemerintah.
  - b. Hasil pengujian untuk variable X2 dimana  $t_{hitung} = -7.378775 < t_{tabel} = 173406$  dan nilai prob 0.000 maka  $H_a$  diterima. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja pemerintah.
2. Uji F. Hasil pengujian untuk Nilai  $F_{hitung} = 31.01499 > F_{tabel} = 3.55$  dengan nilai prob. 0.000001. Maka  $H_a$  diterima artinya terdapat pengaruh signifikan terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
  3. Koefisien Determinasi Berganda. Nilai R Square sebesar 0.775084. Artinya variabel Pengangguran dan kemiskinan memberikan kontribusi terhadap Persentase Belanja Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara sebesar 77.5 persen, sedangkan sisanya 22.5 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

## Pembahasan

### Analisis pengaruh Pengangguran Terhadap Belanja Pemerintah

Variable pengangguran(X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja pemerintah di Sumatera Utara. Jika pengangguran meningkat maka Belanja pemerintah akan menurun. Sebaliknya, jika belanja pemerintah meningkat maka pengangguran akan menurun di Sumatera Utara. Hal ini berkaitan dengan teori saat pengeluaran pemerintah menurun seperti tidak sampai untuk membantu ke desa yang ada di Sumatera Utara sehingga mereka sulit untuk mendapat pekerjaan sehingga pengangguran meningkat. Semuanya berkaitan dengan kebijakan dari pemerintah, atau campur tangan yang dapat dilakukan dengan menjalankan kebijakan fiskal.

### Analisis pengaruh Kemiskinan Terhadap Belanja pemerintah

Variable kemiskinan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja pemerintah di Sumatera Utara. Jika kemiskinan meningkat maka Belanja pemerintah juga akan meningkat. Sebaliknya, jika kemiskinan menurun maka Belanja pemerintah juga akan menurun. Hal ini disebabkan jika kemiskinan meningkat, pemerintah akan turun tangan untuk mengurangi kemiskinan seperti kaitanya dengan teori berkaitan dengan pangan, pendidikan,

kesehatan dan lainnya, pemerintah akan memberi bantuan kepada penduduk miskin dari segi tersebut berupa subsidi, beasiswa, lapangan pekerja, membangun sesuatu untuk mereka dapat hidup layak. Begitu juga sebaliknya.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembuktian hipotesis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Hasil persamaan regresi linier berganda  $Y = 33404.41 + 0.002170(X1) + 0.016800(X2) + e$ , hasil persamaan ini menunjukkan pengaruh pengangguran negatif terhadap belanja pemerintah dan pengaruh kemiskinan positif terhadap belanja pemerintah di Sumatera Utara. Hasil uji t pada variable X1 dimana  $t_{hitung} = -0.483907 < t_{table} = 173406$  maka untuk nilai 1 arah sebesar 0.05 maka  $H_0$  diterima. Dinyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan pengangguran terhadap Belanja pemerintah. Dan Hasil pengujian untuk variable X2 dimana  $t_{hitung} = -7.378775 < t_{table} = 173406$  dinyatakan bahwa terdapat bahwa pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja pemerintah. Hasil pengujian untuk Nilai  $F_{hitung} = 31.01499 > F_{tabel} = 3.55$  dengan nilai prob. 0.000001. Maka  $H_a$  diterima artinya terdapat pengaruh signifikan terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Maka, dalam hal ini sangat diperlukan kebijakan pemerintah yang baik untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Pengangguran dan kemiskinan hampir sama, maka dengan itu perlu alokasi pemerintah pada berbagai sector untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan di Sumatera Utara demi memajukan pertumbuhan ekonomi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anisah (2018). Analisis Dampak Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Melawan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Samudera*. Gulungan, 21 April 2018.
- Azwar. (2016). Peran Alokatif Pemerintah Melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*. Makassar, Vol. 20 No 2 (Agustus 2016)
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara.
- Ningsih, Desrini dan Puti Andiny. (2016). Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Samudera Ekonomika*, Vol 2 No 1, April 2018.
- Sarmita, Risky Dinda. (2018). Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Pengangguran terhadap perekonomian Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Gulungan 16(1):1-11 Juni 2018.